

DAFTAR BACAAN

Winarta, Frans Hendra, Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

Clarence J. Dias, Research on Legal Service Ana Poverty: It's Relevance to The Design of Legal Services Programs in Developing Countries, Washington University, Washington 1975.

Soekanto, Soerjono, Prof, Dr, SH, MA, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis, Ghalia, Jakarta, 1983.

Lubis, T. Mulya, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1986.

Widhayanti, Erni, SH, Hak – Hak Tersangka/ Terdakwa Di Dalam KUHAP, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Nawawi, Taktik Dan Strategi Membela Perkara Pidana, Fajar Agung, Jakarta, 1987.

Abdurrahman, Aspek – Aspek Bantuan Hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta, 1983.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Menteri Kehakiman R.I. Nomor 1 Tahun 1965.

Kovenan Hak Sipil Dan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Lain-lain

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 5/KMA/1972 tanggal 22 Juni 1972.

Keputusan Menteri Kehakiman No.M01.UM.08.10 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Konsultasi bantuan Hukum Fakultas Hukum Negeri.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Badan-Badan Peradilan Departemen Kehakiman Nomor : 0466/Sek-DP/74 tanggal 12 Oktober 1974 yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum oleh Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Negeri.

Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 041/KMA/IV/2009 tanggal 13 April 2009.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Putusan Perkara Nomor 006/PUU-II/2004.

Black's Law Dictionary, edisi kelima, 1979.

Internet

<http://www.hukumonline.com>

<http://rgs-opini-hukum.blogspot.com/2013/06/sejarah-singkat-ke-advokat-an.html>

<http://hukum.kompasiana.com>

<http://www.kompas.com>

<http://books.google.co.id/>